

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sejak tragedi peledakan menara kembar WTC, 11 September 2001, masalah terorisme menjadi topik yang banyak diperbincangkan berbagai kalangan masyarakat di dunia Internasional. Berdasarkan asumsi-asumsi yang mengacu pada keterkaitannya dalam serangkaian aksi teror bom di beberapa negara bagian di Amerika Serikat (AS), nama Osama Bin Laden adalah nama yang paling banyak disebut-sebut dalam perbincangan di dunia internasional. Pasalnya, nama pendiri Al-Qaeda inilah yang dikaitkan dengan isu terorisme internasional dan dituduh AS paling bertanggungjawab terhadap pemboman salah satu *landmark* negara adidaya tersebut.¹

Al-Qaeda pada awalnya adalah sebuah LSM bernama Maktab Al Khidmat lil-Mujjihadin al-Arab (MAK) yang didirikan antara 1982 – 1984 oleh Dr. Abdullah Azzam, seorang tokoh Ikhwanul Muslimin asal Palestina yang mati syahid di Afghanistan tahun 1989, dan Osama Bin Laden.² Organisasi ini mempunyai jaringan luas secara global dan mempunyai akses ke berbagai kelompok teroris atau kelompok radikal militan.³ Sehingga kini, dalam perjalanannya Al-Qaeda telah ditetapkan oleh AS sebagai organisasi teroris dunia. Sedangkan, Osama adalah konglomerat Arab Saudi yang bergabung dengan para mujahidin Afghanistan pada tahun 1979, menjadi

¹ Bambang Abimanyu, *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, Juni 2005, p. 139.

² *Ibid*, p. 139-140.

penyandang dana utama organisasi ini.⁴ Dengan kata lain, adanya jaringan dengan kelompok teroris dan radikal militan di berbagai negara serta dukungan dana yang besar dari pemimpin dan para anggotanya membuat Al-Qaeda menjadi organisasi teroris internasional yang sangat kuat.

Dalam usaha memerangi terorisme, AS telah mengeluarkan miliaran dollar untuk membangun sistem pertahanan dan operasi peredam gerakan terorisme. Bahkan, Kongres telah menyetujui anggaran sebesar 40 Milyar Dollar AS untuk digunakan Presiden George W. Bush sebagai dana program peperangan melawan Terorisme Islam.⁵ Namun jaringan Al-Qaeda yang dikaitkan dengan kelompok Islam tersebut belum juga dapat diberantas. Sebagai akibatnya, sejak saat itu isu terorisme bergeser ke arah kelompok Islam. Peperangan melawan terorisme menjadi semakin rancu dengan peperangan terhadap kaum Islam mayoritas, yang terjadi adalah Barat memojokkan Islam sebagai negara yang mengatur hukum jihad sedemikian rupa sehingga terjadilah peristiwa-peristiwa tragis yang memakan banyak korban. Hal ini tentu saja sangat merugikan hubungan diplomatik antara negara-negara mayoritas berpenduduk Islam dengan negara-negara minoritas Islam. Peristiwa terror tersebut telah mencoreng (*tarnish*) kaum muslim karena fakta para pelaku adalah individu-individu beragama Islam, sedangkan mayoritas kaum muslim berpendapat bahwa aksi terorisme berlawanan dengan ajaran Islam.⁶

⁴ *Ibid*, p. 140.

⁵ *Ibid*, p. 151.

⁶ Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Latar belakang Kerangka Acuan Penyelenggaraan Dialog antar agama Indonesia – Kanada Ottawa*, november 2004.

Meski banyak menerima protes dari dalam maupun Luar Negeri, pemerintahan AS tetap menjadikan terorisme Islam sebagai isu terorisme internasional sehingga hal ini memberikan dampak negatif pada negara-negara yang mayoritas menganut agama Islam. Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia membuat AS memprediksikan bahwa ada sebagian kelompok teroris yang berlindung di Indonesia. Hal yang melatarbelakangi persepsi Amerika tersebut antara lain:

1. Munculnya organisasi-organisasi Islam yang dipimpin oleh warga negara Indonesia keturunan Timur Tengah atau warga Timur Tengah yang berdomisili di Indonesia atau warga Indonesia yang bersekolah di Timur Tengah yang terkenal dengan gerakan Radikalisme, seperti Laskar Jihad, Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indonesia yang cenderung bersikap keras dan selalu memberi kritik tajam kepada pemerintah, selain itu organisasi-organisasi ini juga sangat menentang kebijakan-kebijakan luar negeri AS.
2. Tertangkapnya Faturahman Al Ghazi tahun lalu di Philipina karena memiliki bahan peledak, serta terlibat dalam serangkaian pengeboman bandara Manila, stasiun Metro, terminal bus dan taman pada bulan Desember tahun 2000. Al Ghazali mengaku bahwa ia merupakan alumni dari pondok pesantren Al Mukmin Solo.⁷ Dia juga mengakui keanggotaannya dalam Jamaah Islamiyah yang membiayainya dalam jihad perang suci untuk mendirikan negara Islam.⁸
3. Adanya laporan dari Intelijen AS (CIA) bahwa ormas-ormas Islam radikal di Indonesia memiliki hubungan dengan jaringan teroris internasional, dugaan

⁷ *Koran Tempo*, 29 September 2002.

⁸ *Jawa Pos*, 28 Februari 2002.

tersebut muncul dengan tertangkapnya Umar Al Faruq, juni 2002 di Bogor.⁹ Al-Faruq mengaku diperintah oleh pemimpinnya untuk menghancurkan semua kepentingan AS di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Menyusul kasus peledakan di Legian Bali, pemerintah AS mengaku telah mengetahui sebelumnya tentang rencana peledakan tersebut. "Intelijen kami mendapat informasi tentang ancaman tersebut dari rekaman kaset seseorang yang terkait dengan Al-Qaeda," ujar Gretta Moris, juru bicara Kedutaan Besar AS di Jakarta.¹⁰ Keyakinan AS tentang adanya sarang teroris di Indonesia semakin kuat karena setelah tertangkapnya Amrozi, ditemukan pula VCD wawancara jaringan televisi Al Jazeera dengan Osama dalam penggeledahan di kediaman Imam Samudra di Desa Sanggrahan, kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sedangkan Magasin M-16 dan AK-47 ditemukan di kontrakan kelompok Imam Samudra, yaitu Ali Imron dan Dulmatin alias Novel, dekat rumah Imam Samudra.¹¹

Disamping AS, Singapura adalah negara yang juga mengklaim bahwa Indonesia adalah merupakan sarang teroris (*terroris nest*). Mantan PM Singapura, Lee Kuan Yew, dalam sebuah wawancara dengan majalah *Far Eastern Economic Review*, mengklaim bahwa ada 100 kelompok Islam radikal di Indonesia yang tumbuh subur pada era pemerintahan Habibie.¹² Hal serupa diungkapkan oleh Perdana Menteri Goh Tjok Tong. Berdasarkan penyelidikan, teroris yang diduga melakukan teror bom akhir-akhir ini adalah anggota Jamaah Islamiyah yang operatornya berada di Indonesia.

⁹ www.Suarapembaruan.com/news/2002/10/02/utama/ut01.htm.

¹⁰ www.Tempointeraktif.Com/index.uk.asp.

¹¹ *Kompas*, 25 November 2002, p. 1.

¹² Bambang, *Op. Cit.*, p. 7.

Jamaah Islamiyah yang dipimpin oleh Abdullah Sungkar memiliki jaringan yang amat luas dengan anggota sedikitnya 5.000 aktivis di Asia tenggara. Namun beberapa pihak meragukan keberadaan Jamaah Islamiyah, bahkan Ustad Abu Bakar Ba'asyir, yang diyakini sebagai Amir (pemimpin) Jamaah Islamiyah, dalam persidangan 25 Februari 2005 mengaku tak tahu menahu dengan apa yang dinamakan Jamaah Islamiyah, padahal ia adalah karib Abdulah Sungkar yang tak lain pemimpin Jamaah Islamiyah, dan beberapa bulan setelah kejatuhan rezim orde baru ia mengeluarkan Tadzkirah bersama Amir Abdullah Sungkar dalam majalah Nida'ul Islam (Terbitan Sidney, Australia) edisi ke-24, Juli-Agustus 1998.¹³ Salah satu isi tadzkirah itu menegaskan bahwa umat Islam dihadapkan pada dua pilihan, yaitu hidup dalam sebuah bangsa yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau tewas dalam perjuangan mewujudkan hukum yang secara keseluruhan didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Citra bangsa Indonesia yang mulai memburuk ketika Sungkar dalam wawancaranya dengan majalah Nida'ul Islam edisi ke-17, Februari-Maret 1997 mengatakan bahwa Jamaah Islamiyah merupakan penerus gerakan yang embrionya telah ada di Indonesia yaitu gerakan DI/TII yang telah memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949, namun dengan tertangkapnya Kartosuwiryo pada tahun 1962 gerakan ini berakhir. Dan kini Jamaah Islamiyah yang merupakan perpanjangan dari DI/TII berusaha mengembalikan kesadaran dan kewajiban membangun Dawlah Islam melalui jihad.

¹³ *Ibid*, p. 172.

Memburuknya citra Indonesia ternyata tidak berhenti sampai disini, setelah pada tanggal 12 Oktober 2002 terjadi ledakan di Legian Kuta Bali, disusul dengan bom Hotel JW Marriott (5 Agustus 2003) dan terakhir Bom Kuningan di depan Kedutaan besar Australia (9 September 2004), Indonesia tidak hanya mendapat pandangan negatif dari masyarakat Internasional tetapi juga langsung mendapat dampak negatif dari penurunan citranya.

Salah satu dampak negatif yang dirasakan langsung dari penurunan citra Indonesia di dunia internasional tersebut adalah menurunnya perekonomian Indonesia khususnya dari sektor pariwisata. Anjloknya pendapatan dari sektor wisata terutama di Bali ini tercermin dari tingkat hunian hotel berbintang yang terus menurun. Rata-rata tingkat hunian disana telah anjlok rata-rata menjadi 23,41%, sebelumnya tingkat hunian di Bali rata-rata mencapai 70,27 %, sehari setelah kejadian anjlok menjadi 61,7% yang kemudian terus menurun hingga 23,14 % pada tahun 2003.¹⁴ Bali, sebagai salah satu aset pariwisata internasional, perekonomiannya menurun drastis setelah terjadi peledakan, banyak negara yang memberlakukan *travel warning* bahkan *travel ban*. Seperti perubahan kebijakan pemerintah Australia yang memberlakukan *travel warning* bagi warga negaranya untuk datang berlibur ke Indonesia, khususnya Bali. Peristiwa bom Bali yang telah menelan korban mayoritas penduduk Australia merupakan alasan yang pantas bagi pemerintah Australia untuk memberlakukan *travel warning* bagi warga negaranya untuk datang berlibur ke Indonesia.

¹⁴ Elzan Kamala, Skripsi "*Pengaruh 'Bom Bali' Terhadap Hubungan Australia-Indonesia*" Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2003, p. 157.

Tak lama setelah pemberlakuan *travel warning* oleh Australia, beberapa negara seperti AS, Singapura dan negara-negara Eropa turut melakukan hal yang serupa untuk melindungi warganya dari serangan teroris di Indonesia. Bahkan pemerintah Jerman tidak hanya memberikan peringatan kepada warganya, lebih jauh pemerintah Jerman memberikan larangan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia atau yang lebih dikenal dengan *travel ban*. Hal ini membuktikan sudah tidak ada lagi kepercayaan dari dunia internasional terhadap keamanan dalam negeri di Indonesia, untuk itu beberapa negara terutama negara-negara yang memberlakukan *travel warning* terhadap Indonesia menawarkan bantuan investigasi untuk mengungkap para pelaku teror bom di Indonesia.

Selain *travel warning* dan *travel ban* dengan dalih menjaga keamanan dan untuk mencegah potensi serangan teroris, beberapa negara Barat mengambil kebijakan yang dianggap diskriminatif dan merugikan pemeluk agama Islam. Warganegara dari negara-negara Islam atau mayoritas berpenduduk muslim yang menetap di, atau berkunjung ke negara-negara Barat diwajibkan melaporkan diri, bahkan AS mempersulit visa kunjungan bagi warga negara Indonesia dan umat Islam dari berbagai negara sehingga untuk mendapatkan visa saja mereka harus menjalani pemeriksaan yang ketat di bandara udara. Padahal sesungguhnya Indonesia juga merupakan negara korban aksi terorisme.

Mungkin memang terorisme pernah ada di Indonesia tetapi Indonesia tidak pernah mencetak teroris-teroris untuk melakukan teror demi kepentingan tertentu. Pemerintah Indonesia sendiri menyadari bahwa terorisme adalah bahaya laten, untuk itu

pemerintah telah mengagendakan perang melawan terorisme, salah satunya dengan mengesahkan Undang-undang anti terorisme dan menerapkan langkah-langkah pengamanan lokal melalui kerjasama dengan intelijen, dinas-dinas yang terkait dan masyarakat luas.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, menampilkan citra Islam yang moderat dan toleran di Indonesia merupakan hal yang sangat penting. Citra Indonesia yang memburuk ini perlu dikembalikan, terutama citra mengenai toleransi dan kerukunan/keharmonisan antara umat beragama baik di Indonesia maupun di tingkat internasional.

B. Tujuan Penulisan

Sebagai salah satu mahasiswi politik kita harus peka terhadap situasi politik yang berkembang dan terjadi disekitar kita, baik yang berada di dalam maupun diluar negeri. Dalam era globalisasi saat ini kita tidak bisa hanya berfikir secara lokal maupun regional saja, peran masyarakat internasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara makin lama makin meningkat dan akhirnya pengakuan dan dukungan dari dunia internasional menjadi suatu kebutuhan. Menyikapi kondisi dan citra Indonesia di mata dunia internasional yang makin menurun beberapa tahun ini, maka penulis berupaya untuk memberikan kontribusi bagi penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan citra melalui *Interfaith Dialogue* yang telah dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, tanggal 21-22 Juli 2005.

Hal ini merupakan langkah awal bagi upaya diplomasi Indonesia di dunia internasional untuk memulihkan citranya yang terpuruk setelah terjadi peristiwa bom Bali. Diplomasi yang merujuk pada konsep *Total Diplomacy* ini bertujuan memberikan pengaruh dan informasi ke dalam dan luar negeri. Untuk itu, sebagai mahasiswi politik, penulis merasa tergerak untuk memberikan informasi politik dalam pemerintahan negara kita agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang simpang-siur. Selain itu, skripsi ini ditujukan untuk mencoba menerapkan teori-teori yang pernah di peroleh selama mengikuti perkuliahan. Skripsi ini juga penulis susun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan strata satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Pokok Permasalahan

Bagaimana upaya pemerintah dalam memulihkan citra bangsa Indonesia di forum internasional?

D. Kerangka Dasar Teori

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis tentang masalah pokok yang telah di kemukakan, penulis akan menggunakan *Teori Image* dan total diplomasi dari konsep *Diplomasi Kebudayaan* sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

1. Teori *Image*

Teori *Image* menurut Kenneth E. Boulding, pada dasarnya menyatakan bahwa setiap pengambilan keputusan maupun kebijakan suatu negara akan sangat tergantung pada *image* negara tersebut terhadap objeknya.¹⁵

Image adalah pesan masa lalu yang tumbuh melalui struktur informasi dan informasi tersebut dapat menjadi input maupun output bagi *image*. Pentingnya *Image* bagi suatu negara adalah bahwa *image* tersebut akan membentuk pola perilaku negara dalam sistem internasional. *Image* suatu bangsa sering disebut *image historis*, yang sudah tumbuh sejak lama dan mungkin dipengaruhi oleh mitos masa lalu dan masa depan.¹⁶ *Image* suatu bangsa juga dapat diartikan sebagai proses persepsi yang selektif dalam penilaian sejarah, sistem pendidikan, cerita-cerita rakyat, media-masa dan saluran-saluran lain.¹⁷ *Image* dapat menimbulkan ancaman maupun keinginan bersahabat suatu negara dalam memandang negara lain. Hal tersebut ditentukan oleh intensitas interaksi hubungan antar negara yang berinteraksi.

Image suatu negara merupakan cara pandang negara-negara lain terhadap negara tersebut yang dipengaruhi oleh citra negara tersebut yang akan

¹⁵ Kenneth E. Boulding, "National Images and International Systems", dalam James N. Rosenau, ed., *International politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory* (New York: The Free Press 1969), p. 426-428.

¹⁶ *Ibid.*, p. 429.

¹⁷ Bambang Wahyu Nugroho, "Teori Mikrokosmik Tentang Konflik Berkekerasan", hal 23, jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006.

mempengaruhi hubungan negara itu dengan negara-negara lain di dunia internasional.

Karena *image* merupakan determinan bagi perilaku negara maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain:¹⁸

a. Dimensi Geografis

Faktor ini dapat membentuk apa yang dinamakan mental map, yaitu mental suatu bangsa yang terbentuk oleh letak geografi negara tertentu.

Letak geografis antar pulau yang saling berdekatan dengan latar belakang sejarah kolonial dan rasa senasib sepenanggungan antar berbagai suku bangsa di Indonesia telah melahirkan semangat kesatuan antar berbagai suku bangsa tersebut dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Citra bangsa Indonesia yang dipandang dari letak geografis tersebut telah menjadi pembeda atau ciri antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain dalam dunia Internasional, sehingga dimensi geografis ini menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan citra bangsa Indonesia di dunia internasional yang kemudian meningkatkan *image* dunia internasional terhadap Indonesia..

b. Dimensi Kebudayaan

Keberagaman budaya Indonesia, baik yang dikenal dengan budaya hasil cipta atau peradaban maupun budaya sosial dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras dan agama telah melahirkan nilai budaya dalam tingkat yang tinggi dalam pergaulannya dengan bangsa lain di dunia

¹⁸ Kenneth, *Loc. Cit.*, p. 433-434.

Internasional. Hal tersebut terlihat dalam peninggalan-peninggalan sejarah yang masih dilestarikan, diantaranya berupa bangunan-bangunan peninggalan jaman kerajaan yang merupakan cikal bakal lahirnya bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan peradaban tertua di Indonesia yang masih ada dan tetap dijaga, serta hasil kerajinan tangan dan entitas suku bangsa (seperti pakaian adat, rumah adat, lagu daerah, dll) yang terlihat masih sangat dihargai dan dilestarikan oleh pemerintah dan warga masyarakat sekitarnya.

Sedangkan mengenai budaya sosial seperti ; pluralisme agama, sikap toleran, dan gotong royong, merupakan dimensi budaya sosial yang masih sangat menonjol dalam masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia, yang sekaligus merupakan citra baik bangsa Indonesia di dunia internasional.

c. Dimensi Kekuatan dan Kelemahan Suatu Negara

Dalam hal ini yang dimaksud dengan kekuatan dan kelemahan suatu negara adalah seluruh perubahan kondisi ekonomi, politik, militer, sosial dan budaya suatu negara.

Perubahan kondisi politik, sosial maupun ekonomi negara Indonesia berpengaruh terhadap eksistensi dan partisipasinya dalam berbagai kegiatan politik di dunia Internasional. Perubahan ini sangat menentukan citra bangsa Indonesia karena menyangkut tentang kredibilitas pemerintah dalam menjalankan mesin politiknya, sehingga ketika perubahan ini menuju kearah negatif maka secara otomatis image dunia Internasional terhadap Indonesia

menurun dan menyebabkan terjadinya hubungan politik yang buruk yang berdampak negatif terhadap kondisi domestik Indonesia.

Sehubungan dengan terlalu luasnya lingkup bahasan, maka saya batasi perulisan ini hanya dalam lingkup melemahnya kondisi ekonomi dan sosial bangsa Indonesia sebagai dampak dari teror bom Bali yang sangat berpengaruh terhadap bidang ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.

2. Konsep Diplomasi Kebudayaan

Diplomasi Kebudayaan adalah diplomasi yang memanfaatkan aspek budaya dalam mencapai kepentingan Nasionalnya. Secara makro, diplomasi kebudayaan diartikan sebagai usaha-usaha suatu negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, termasuk didalamnya adalah pemanfaatan bidang-bidang ideologi, teknologi, politik, ekonomi, militer, sosial, kesenian dan lain-lain dalam percaturan masyarakat internasional.¹⁹

Tujuan utama diplomasi kebudayaan adalah untuk mempengaruhi pendapat umum (masyarakat negara lain) sehubungan dengan arahan kebijakan luar negeri yaitu : “melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif memulihkan martabat bangsa dan negara serta kepercayaan luar negeri termasuk lembaga pemberi pinjaman dan kalangan investor terhadap pemerintah”.²⁰

Sedangkan, *total diplomacy* yang di maknakan sebagai '*diplomacy that views domestic and foreign issues as inseparable*' oleh Dean Acheson ketika masih

¹⁹ Tulus Warsito, *Diplomasi Kebudayaan; Dalam Strategi Politik Luar Negeri Negara-Negara Sedang Berkembang* (Yogyakarta, FISIPOL UMY, 1998), p. 2.

²⁰ *Ibid*, p. 3.

menjabat sebagai Menlu AS, antara tahun 1949 – 1952, telah diungkapkan sebelumnya oleh bung Hatta dalam pidato radio tanggal 15 Desember 1945 bahwa *“politik luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah mestilah sejalan dengan politik dalam negeri. Seluruh rakyat harus berdiri tegapnya dan rapatnya dibelakang Pemerintah Republik Indionesia. Persatuan yang sekuat-kuatnya harus ada, barulah pemerintah dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya dari diplomasi yang dijalankan”*.²¹

Dewasa ini masyarakat Internasional menghadapi tantangan yang sangat serius karena di beberapa tempat di dunia ini masih terus menghadang permasalahan yang disebabkan oleh antara lain prasangka, kesalahpahaman dan kurangnya toleransi antar agama yang mendorong munculnya konflik. Selain itu, meningkatnya berbagai kasus terorisme yang dikaitkan dengan salah satu ajaran agama turut memberikan kontribusi berupa dampak negatif terhadap negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam dan salah satu negara yang terkena imbas tersebut adalah Indonesia. Menurunnya citra Islam dalam dunia Internasional disertai dengan terjadinya beberapa peristiwa bom di tanah air memunculkan pandangan negatif serta hilangnya kepercayaan dari masyarakat Internasional terhadap Indonesia, sehingga otomatis hal ini membuat citra Indonesia di dunia Internasional menurun.

Sehubungan dengan menurunnya citra Indonesia di dunia Internasional, pemerintah telah mengagendakan upaya pemulihan atau peningkatan citra positif

²¹ Wahyu Hersetiati, *Perkembangan Terkini Politik Luar Negeri RI*, Short Diplomatic Course Departemen Luar Negei RI, HIMAH FISIP Jayabaya, Jakarta, 29-31 Maret 2004.

Indonesia sebagai kebijakan luar negeri yang merupakan salah satu prioritas dari program kerja di bidang kebijakan luar negeri seperti yang akan dijabarkan dibawah :

Dalam kaitannya dengan politik luar negeri, secara spesifik program kerja di bidang kebijakan luar negeri telah dijabarkan dalam beberapa prioritas antara lain sebagai berikut :²²

- 1) Memagari kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI;
- 2) Mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional;
- 3) Peningkatan citra positif RI; dan
- 4) Pelayanan masyarakat, serta perlindungan WNI.

Citra bangsa indonesia di masa lalu yang terkenal sebagai bangsa yang pluralis dan toleran antar umat beragama mencoba dimunculkan kembali setelah terjadinya ledakan Bom Bali I pada Oktober 2002 yang lalu. Lebih jauh, sebagai akibat merebaknya terorisme atas nama Islam sejak Bom WTC, Bom London hingga Bom Bali II, citra bangsa yang plural-demokratis diangkat sebagai *counter isu* yang diharapkan akan merubah *stigma* atau cara pandang dunia internasional terhadap masyarakat Indonesia khususnya terhadap citra umat muslim Indonesia yang telah tercoreng.

Pembentukan citra Indonesia yang positif di mata dunia Internasional adalah penting karena apa yang terjadi di dalam negeri akan sangat berpengaruh dengan

²² *Ibid*, p. 3.

hubungan dan politik luar negeri negara ini dengan negara-negara lain.²³ Untuk itu, upaya pemulihan citra bangsa Indonesia sehubungan dengan memburuknya citra salah satu agama yang mayoritas dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah sangat penting. Sehingga dalam perjalanannya, langkah yang diambil oleh pemerintah dalam memulihkan citra yang telah menurun salah satunya adalah melalui jalan diplomasi kebudayaan, cara damai dengan tanpa menggunakan alat politik maupun kekerasan. Melaksanakan diplomasi kebudayaan berarti berusaha dengan sengaja dan terarah menanamkan, mengembangkan dan memelihara citra bangsa di luar negeri sebagai bangsa yang berbudaya tinggi.

Keberhasilan suatu langkah diplomasi sangat di tentukan oleh keadaan politik dalam negeri serta kerjasama dari semua pihak, dimana dukungan rakyat sangat memegang peranan penting. Keikutsertaan semua komponen bangsa perlu ditingkatkan dalam mendukung keberhasilan diplomasi. Oleh karena itu total diplomasi diyakini akan mampu menjawab berbagai tantangan diplomasi pada era modern ini.

Karena isu yang diangkat dalam penurunan citra Indonesia berhubungan dengan satu agama yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, maka *counter issue* yang dipergunakan oleh pemerintah dalam upaya memulihkan citra adalah melalui jalan diplomasi kebudayaan yang memanfaatkan aspek *ideology* atau agama. Dengan bekerjasama dengan negara-negara Eropa, pemerintah mengadakan dialog lintas agama yang kemudian lebih dikenal dengan *Interfaith Dialogue*.

²³ Direktorat Diplomas Publik, *Diplomasi pendidikan dan Kebudayaan*, Deplu, Jakarta 4 Juli 2005, p. 3.

Interfaith Dialogue adalah upaya diplomasi bangsa Indonesia untuk memulihkan citra bangsa di dunia Internasional melalui sebuah dialog yang dilakukan secara total oleh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, seperti para intelektual, tokoh agama, LSM, media, budayawan, para pejabat tinggi pemerintah dan organisasi-organisasi yang terkait. Selain dari masyarakat Indonesia dialog ini juga mengundang beberapa negara Eropa, PBB, Vatikan, dan persatuan umat konghucu, serta perwakilan dari berbagai agama lainnya. Dialog tersebut mengangkat topik tentang agama, sosial, pendidikan, kebudayaan dan media, dan masing-masing topik berada dalam tataran yang pada tempatnya. *Interfaith Dialogue* merupakan media bangsa Indonesia dalam mengkomunikasikan ketimpangan-ketimpangan pandangan masyarakat Internasional terhadap masyarakat Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya sangat dialogis dan damai.

Ide untuk menyelenggarakan suatu dialog antara para tokoh lintas agama dunia dicetuskan oleh Menlu Hassan Wirajuda saat pertemuan APEC di Bangkok pada tahun 2003, di bawah bendera tema "pemberdayaan kaum moderat". Ide tersebut kemudian dibahas lebih lanjut pada pertemuan ASEAN Regional Forum (ARF) di Jakarta pada bulan Juli 2004.²⁴

Kali ini dalam kerangka *Asia-Europe Meeting* (ASEM) Indonesia telah menyelenggarakan Bali Interfaith Dialogue di *Bali International Convention Center* (BICC), Nusa Dua, Bali, tanggal 21-22 Juli 2005. Dari 39 mitra ASEM, 11 mitra menjadi ko-sponsor yaitu Inggris, Belanda, Denmark, Filipina, Finlandia,

Malaysia, Singapura, Spanyol, Thailand, Yunani dan Komisi Eropa. Penyelenggaraan Dialog tersebut merupakan keputusan para Pemimpin ASEM dalam KTT ASEM di Hanoi, Oktober 2004 yang menyetujui usulan Indonesia dan Inggris sebagai inisiatif penting ASEM dalam menanggapi tantangan global untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran internasional.²⁵

E. Hipotesa

Sehubungan dengan memburuknya citra Indonesia pasca bom Bali, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk mengadakan *interfaith dialogue* sebagai sarana diplomasi dalam bidang kebudayaan yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam suatu sinergi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Didalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan. Diharapkan dengan data-data ini dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian.

²⁵ Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Foreign Policy Breakfast*, Gedung Pancasila Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Selasa, 12 Juli 2005, 08.00-09.30.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis membatasi lingkup penelitian yang menekankan pada isu terorisme, terutama terror Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002.

H. Sistematika Penulisan

- BAB I : Mengenai pokok masalah yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya, berisi alasan penulis mengambil judul, tujuan, latar belakang masalah, kerangka dasar teori hingga hipotesa, tehnik pengumpulan data penunjang penulisan, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II : Mengenai menurunnya citra bangsa Indonesia di dunia internasional
- BAB III : Memburuknya citra Islam pasca tragedi WTC mempengaruhi citra baik umat Islam Indonesia, sehingga ketika terjadi peristiwa bom Bali, citra Indonesia di dunia internasional semakin terpuruk.
- BAB IV : Mengenai upaya pemulihan Citra bangsa Indonesia yang menurun pasca tragedi bom Bali melalui kerjasama Indonesia dengan negara-negara Eropa dalam *Interfaith Dialogue* yang telah berlangsung di Nusa Dua Bali pada tanggal 21 juli 2005.
- BAB V : Berisi tentang kesimpulan.